

PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Beryaldi Agam¹, Andi Panca Wahyuni², Nurul Eka Wijayanti²

¹*Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Sambas,*

^{2,3}*Staf Pengajar Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas*

Muhammadiyah Sinjai,

Email: beryaldiagam@poltesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan teknostruktur terhadap pengembangan kawasan minapolitan rumput laut dan untuk mengetahui peran kelembagaan masyarakat terhadap pengembangan kawasan minapolitan rumput laut.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Juli sampai Agustus 2019, yang bertempat di Desa Ampekalle, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Menentukan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) pada daerah yang memungkinkan untuk melakukan studi mendalam tentang pengaruh teknostruktur dan peran kelembagaan masyarakat pesisir terhadap pengembangan kawasan minapolitan. Jenis penelitian adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif sebagai pendekatan utama (*qualitative dominant*). Strategi penelitian adalah studi kasus.

Hasil penelitian adalah 1). Keterkaitan teknostruktur terhadap pengembangan kawasan minapolitan hanya berpengaruh pada komunitas pembudidaya rumput laut, sementara untuk pelaku usaha pasca produksi belum melahirkan diversifikasi olahan rumput laut, supporting pemerintah dalam pembangunan infrastruktur masih sangat minim dalam kaitannya sebagai kawasan sentra produksi dan pengolahan serta pemasaran; 2). Peran kelembagaan formal khususnya koperasi belum melembaga dalam pengembangan kawasan minapolitan, untuk kelembagaan non formal hanya bergerak dalam kegiatan pemasaran. Sehingga kelembagaan formal maupun non formal belum sepenuhnya mendukung pengembangan minapolitan.

Keyword: *Teknostruktur, Kelembagaan, Minapolitan*

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between technology to the development of the seaport Minneapolitan area and to determine the role of community institutions in the development of the seaport Minneapolitan area.

This research was conducted for two months, from July to August 2013, which was located in the village of Ampekalle, Bontoa District, Maros Regency. Determining the location of the research was carried out in a purposive manner in areas that made it possible to conduct an in-depth study of the influence of infrastructure and the role of coastal community institutions on the development of the Minneapolitan area. This type of research is exploratory research. This study uses a qualitative method approach as the main approach (qualitative dominant). The research strategy is a case study.

The results of the study are 1). The linkages of technology to the development of the Minneapolis area only affect the seaweed cultivating community, while for post-production businesses do not yet produce diversification of processed seaweed, supporting the government on infrastructure development is still very minimal in relation to the production center area and the deception as well as marketing; 2). The role of formal institutions especially cooperatives has not yet been institutionalized in the development of the Minneapolis area, for non-formal institutions only engaged in marketing activities. So that formal and informal institutions have not fully supported the development of Minneapolis.

Keyword: *Tecnostructure, Institutions, Minneapolis*

PENDAHULUAN

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar, apalagi saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang baik berskala internasional maupun nasional, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi masalah dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan dengan kebijakan dan program strategis serta efektif (Sunoto, 2010).

Dalam upaya menghadapi masalah dan tantangan diperlukan kebijakan yang inovatif dan kreatif. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim dengan gerakan yang mendasar dan cepat, atau disebut dengan Revolusi Biru. Pada tataran implementasi diperlukan sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep minapolitan (Sunoto, 2010).

Pengembangan program minapolitan ditunjang oleh sumber daya manusia yang paham akan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern dibidang perikanan telah memberi kesempatan yang luas pada masyarakat pesisir dalam mengeksplorasi sumberdaya hayati laut seoptimal mungkin. Namun manfaat teknologi yang terperagakan tersebut mulai pula dipertanyakan akibat merosotnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati perairan serta kualitas lingkungan (Keraf, 2002) dalam Akzam (2011). Oleh karena itu, dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) maka pendekatan secara non-struktural, melalui peranan pengetahuan lokal penduduk asli dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hayati perairan yang sarat dengan nilai konservasi memiliki peranan penting dan strategis. Sementara pendekatan secara struktural, pemerintah harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan masyarakat dalam melestarikan aktifitas-aktifitas secara tradisional yang tetap dipertahankan yang mendukung pemanfaatan sumberdaya hayati perairan secara berkelanjutan (Aklam, 2011) dan meningkatnya teknostruktur masyarakat pesisir dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga menghasilkan produk komoditas unggulan sesuai dinamika lingkungan strategis kawasan tersebut serta berkembangnya kelembagaan tingkat desa yang memberi ruang bagi akses dan kontrol masyarakat dalam mengelola manfaat dari sumber daya wilayah.

Pengembangan minapolitan dengan prinsip percepatan/akselerasi daerah menjadi suatu kota terkendala oleh pengetahuan masyarakat yang masih tradisional terhadap cara penggunaan teknologi modern. Sehingga perlunya sosialisasi penggunaan teknologi oleh pihak terkait serta kelembagaan masyarakat pesisir dapat bekerja bersinergi dengan pemerintah. Agar program pengembangan kawasan minapolitan dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bersifat “*Top Down*”.

TINJAUAN LITERATUR

Minapolitan sendiri berasal dari kata “mina” berarti ikan dan “politan” berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di daerah pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia

juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di daerah perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di daerah perkotaan.

Dengan konsep minapolitan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku, dan hasil produksi di sentra-sentra produksi. Sebagai sentra produksi, daerah pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana daerah perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku, dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Konseptual minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, (1). Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan (2). Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara ringkas minapolitan dapat didefinisikan sebagai konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi, dan kualitas serta akselerasi tinggi. Sementara itu, kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait (Sunoto, 2010). Minapolitan bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu: minapolitan perikanan tangkap dan minapolitan perikanan budidaya. Kedua jenis aktifitas ekonomi ini memiliki dimensi keruangan yang berbeda. Produksi bahan mentah pada sistem penangkapan ikan dilakukan secara terpusat di tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Aktifitas pengolahan (pabrik es, lahan pengeringan, pengalengan) bisa dirancang pada lokasi dekat dengan pendaratan ikan. Pada kasus budidaya (air tawar), aktifitas budidaya dilakukan secara tersebar dan banyak menjadi satu dengan lahan perumahan penduduk.

Kelembagaan berasal dari akar kata lembaga. (Purwadaminta, 2004) memberi arti lembaga sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Juga disebutkan bahwa lembaga dapat pula diartikan sebagai perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Kelembagaan nelayan terdapat beberapa jenis antara lain kelembagaan ekonomi perbankan, koperasi, dan pasar, kelembagaan sosial seperti lembaga sosial masyarakat, punggawa-sawi, organisasi kemasyarakatan nelayan, dan lembaga pemerintah dalam hal ini departemen kelautan dan perikanan. Lembaga-lembaga tersebutlah yang selama ini mengatur dan banyak menentukan pengelolaan sumberdaya alam laut yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nelayan (Dahuri, 2002).

Program pengembangan kawasan perikanan (minapolitan) merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir. Salah satu sasaran dari program minapolitan adalah pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis sehingga mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditas unggulan perikanan setempat yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha minabisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan dengan infrastruktur yang mendukung proses aktivitas budidaya rumput laut, pengolahan hasil rumput laut, dan pemasarannya. Kualitas teknostruktur suatu wilayah ditentukan oleh kekuatan kelembagaan (O-N) dan ketepatan teknologi dalam mengelola potensi desa. Penguatan kelembagaan diupayakan bersinergi dengan pengembangan inovasi teknologi. Sinergi antara potensi sumberdaya alam,

finansial, manusia, dan sarana-prasarana akan optimal dengan adanya teknologi yang tepat dalam menambah nilai dari keseluruhan rangkaian aktivitas untuk menghasilkan produk. Inovasi teknologi dapat difasilitasi melalui dua cara. Pertama, mendorong penemuan sendiri oleh masyarakat desa melalui sistem pengetahuan asli yang dikuasainya dan akumulasi pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya selama ini. Kedua, mendorong adopsi inovasi dari luar, baik inovasi lembaga penelitian maupun inovasi dari praktek cerdas masyarakat lain. Dua cara ini diaplikasikan bersinergi sesuai kebutuhan kegiatan budidaya rumput laut.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ampekalle Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros selama 2 Bulan yaitu pada bulan juni sampai juli 2019

. Penentuan lokasi ini dipilih secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Bontoa merupakan wilayah pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Maros.

Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian eksploratif yang menggambarkan suatu konsep keseluruhan tahapan penelitian, mulai persiapan, pengumpulan data maupun pengolahan data dilakukan dengan prinsip pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi literatur.

Populasi dan Informan

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat pesisir, pelaku usaha, dan pemerintah di Desa Ampkalle Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling (Miles dan Huberman, 1992). Kriteria dasar informan adalah: (1). Paham akan kondisi aktivitas budidaya rumput laut dikawasan minapolitan; (2). Memiliki keterlibatan langsung dengan aktivitas minapolitan rumput laut (secara berulang/ selalu melakukan); (3). Memiliki waktu yang cukup (tidak terlalu sibuk dan mudah diwawancarai, dan (4). Bersifat non-analitis (Spradley, 1987). Setelah penelitian sebanyak 17 informan diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*) atau *verstehen*. Pengertian kualitatif di sini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata ke dalam bentuk teks yang diperluas bukan angka-angka (Miles dan Huberman, 1992). Data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dibuat catatan lapangan yang selanjutnya disederhanakan /disempurnakan dan diberi kode data serta masalah. Pengkodean data berdasarkan hasil kritik yang dilakukan, data yang sesuai dipisahkan dengan kode tertentu dari data yang tidak sesuai dengan masalah penelitian atau data yang diragukan kebenarannya. Data yang diperoleh dianalisis secara komponensial (*componetial analysis*) dengan melalui tiga tahap:

1. Tahap pertama, analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan. Dalam prosesnya, dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria eksklusif- inklusif. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampel tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar, dan membuat kerangka dasar penyajian data.
2. Tahap kedua, penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasikan menurut tema dan kebutuhan analisis.
3. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data.

Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Teknostruktur Masyarakat Pesisir dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi ini pun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya perikanan seperti kegiatan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan teknologi yang sederhana. Secara umum ada dua jenis teknologi menurut sumbernya yang telah dikembangkan oleh masyarakat pesisir Sulawesi Selatan sampai dewasa ini. *Pertama* adalah yang dilahirkan oleh pengetahuan asli (*local knowledge*) yang seringkali berkaitan erat dengan kepercayaan lama yang bersifat tradisi dan bersumber dari dalam. *Kedua*, yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan atau dengan penggunaan keterangan-keterangan ilmiah yang kebanyakan bersumber dari luar masuk kedalam masyarakat melalui kontak dengan dunia luar (teknologi modern). Teknologi yang digunakan dilokasi penelitian baik alat maupun metode yang digunakan banyak diadopsi dari luar lingkungan masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dari kegiatan penyuluhan perikanan oleh dinas kelautan dan perikanan serta POKJA Minapolitan itu sendiri. Program minapolitan budidaya rumput laut di lokasi penelitian dengan beberapa keuntungannya yaitu (1). Budidaya rumput laut yang menggunakan teknologi sederhana dan pengetahuan yang tidak terlalu rumit, (2). Modal yang relative rendah dengan pendapatan yang lebih baik (3). Resiko kerugian yang tidak terlalu besar. (4). Masa tanam yang pendek dan memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya dominan membudidayakan udang dan ikan bandeng beralih ke rumput laut.

B. Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Rumput Laut

1. Kelembagaan Formal

a. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

Kelembagaan formal yang sudah terbentuk di lokasi ini adalah Kelembagaan Pelaku Utama Kelompok Pembudidaya Perikanan disingkat (POKDAKAN). Pokdakan Desa Ampekalle terletak di Dusun Padaria dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang yang diketuai oleh Bapak Syamsul Bahri dan mempunyai seorang penyuluh Pembina bernama Bapak Febri, S.Pi. Pokdakan Padaria I berdiri pada tahun 1996 pada mulanya anggotanya hanya membudidayakan ikan bandeng dan udang setelah tahun 2011 memulai kegiatan polikultur dengan variasi rumput laut dan ikan bandeng, rumput laut dengan udang, atau rumput laut- udang-ikan bandeng. Melalui Pokdakan komunitas pembudidaya rumput laut menerima bantuan berupa bibit dan pupuk serta penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan secara rutin seperti penyuluhan budidaya rumput laut serta fungsi lain dari pokdakan adalah sebagai penyambung informasi dari pemerintah kepada masyarakat pembudidaya rumput laut.

b. Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Penyuluhan dan bimbingan teknologi mina bisnis merupakan kelembagaan formal lainnya di Desa Ampekalle Kecamatan Bontoa. Penyuluh berada di bawah tanggung jawab Dinas Perikanan setempat. Sosialisasi penerapan cara budidaya rumput laut yang baik (*good aquaculture practices*) terus dilakukan oleh para penyuluh sebagai upaya penyiapan pelaku utama dan pelaku usaha untuk selalu mengutamakan kualitas dan peduli lingkungan dalam budidaya perikanan di era globalisasi. Penggunaan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan minapolitan merupakan tujuan utama para penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya sehingga aktivitas budidaya rumput laut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjadikan lokasi penelitian sebagai sentra produksi rumput laut.

c. Koperasi

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian bahwa terdapat kelembagaan formal lainnya yaitu koperasi yang berfungsi sebagai sarana usaha pemasaran budidaya rumput laut. Awalnya pemasaran rumput laut dilakukan oleh koperasi agar harga rumput laut stabil di wilayah tersebut karena harga mudah dipermainkan oleh pedagang perantara atau pedagang pengumpul. Akan tetapi fungsi dari lembaga tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pembudidaya sehingga banyak warga tidak menjual rumput lautnya di koperasi ini. Pasalnya lembaga pemasaran ini memberikan nilai jual yang murah untuk rumput laut tersebut. Sehingga banyak pembudidaya rumput laut lebih memilih *Pappalele* sebagai mitra kerjanya untuk penjualan rumput lautnya. Peran koperasi di masyarakat belum melembaga, banyak masyarakat yang mengetahui adanya koperasi namun hanya sebagian kecil yang menjalankan karena rendahnya harga beli rumput laut dan sangat minim masyarakat menjaga entitas koperasi. Hal ini mengakibatkan kelembagaan ini tidak aktif lagi di lokasi penelitian.

2. Kelembagaan Informal

Menurut Soekanto (1999) untuk mengkaji peran kelembagaan dalam suatu sistem sosial, maka secara keseluruhan aspek kelembagaan harus dilihat dalam konteks: (1). Memberikan pedoman, bagaimana harus bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah dalam hidup; (2). Menjaga keutuhan masyarakat, serta (3). Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk pengendalian sosial, atau menjadi sistem pengawasan tingkah laku.

Dengan demikian, dalam menjelaskan elemen-elemen kelembagaan dalam suatu sistem sosial masyarakat maka pendekatan analisisnya dapat dilakukan dengan menerapkan metode holistik untuk mendefinisikan suatu sistem atau mekanisme hubungan antara masyarakat yang terbagi dalam tiga aspek yaitu; hubungan dengan sang pencipta; hubungan antara masyarakat itu sendiri, dan hubungan dengan sumberdayanya. Konteks ini telah dipertegas

sebelumnya oleh Nur Indar (2005) bahwa ketiganya aspek inilah yang mewarnai perjalanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan pada kebanyakan daerah di Indonesia yang terpresentasikan dalam sistem kelembagaan tradisional. Memakai pendasaran Nur Indar (2005) maka bentuk kelembagaan non formal yang berhubungan dengan teknostruktur dalam pengembangan kawasan minapolitan di Desa Ampekalle Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dapat dilihat pada hubungan antara masyarakat itu sendiri.

a. Hubungan antar masyarakat dalam kegiatan budidaya rumput laut

Pembudidaya rumput laut sebagai pengelola sumber daya perikanan yaitu rumput laut dalam kesehariannya lebih menitik beratkan aktivitas budidaya rumput laut secara bersama-sama atau berkelompok. *Lay out* tambak yang berdekatan dengan infrastruktur pengairan yang kurang memadai membuat petambak saling membantu dalam hal pembagian suplay air yang masuk ketambak. Saling pengertian sesama petambak merupakan tradisi berbagi yang masih dianut sampai sekarang demi kelancaran dan menjaga hubungan dari konflik – konflik yang mungkin terjadi.

b. Hubungan antara masyarakat dalam kegiatan pemasaran rumput laut

Rumput laut kering dan siap jual biasanya dijual kepada pedagang yang biasa disebut *Pappalele*. Dalam hal ini transaksi jual beli rumput laut *Pappalele* datang langsung ke tempat pembudidaya rumput laut dengan harga Rp. 2.700- Rp 5.000/Kg Selanjutnya pappalele ini menjual rumput laut tersebut ke beberapa jaringan perdagangannya diluar Kabupaten Maros dengan harga yang lebih tinggi.

Pappalele berasal dari kata “lele” yang berarti pindah dan mappalele berarti meindahkan. Jadi arti harfiah *Pappalele* adalah orang yang memindahkan. Keberadaan pappalele ini sangat menguntungkan bagi petani rumput laut. Perlu diketahui *Pappalele* ada dua jenis *Pappalele*, yaitu *Pappalele* yang terikat dengan punggawa posasi dan *Pappalele* yang tidak terikat (bebas dan mandiri) akan tetapi dalam hal ini pappalele yang dimaksud disini adalah *Pappalele* yang tidak terikat yang memiliki modal yang cukup untuk berusaha sendiri.

Peran *Pappalele* dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai penyambung rantai pemasaran komunitas pembudidaya rumput laut sehingga pasca panen produksi rumput laut. Hasil nya dapat dijual dan dipasarkan ke pedagang yang berada didalam maupun diluar Kabupaten Maros agar kegiatan produksi dapat dilaksanakan kembali

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengamatan yang dilaksanakan di Desa Ampekalle Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan teknostruktur terhadap pengembangan kawasan minapolitan hanya berpengaruh pada komunitas pembudidaya rumput laut, sementara untuk pelaku usaha pasca produksi belum melahirkan diversifikasi olahan rumput laut, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur masih sangat minim dalam kaitannya sebagai kawasan sentra produksi dan pengolahan serta pemasaran.
2. Peran kelembagaan formal khususnya koperasi belum melembaga dalam pengembangan kawasan minapolitan, untuk kelembagaan nonformal hanya bergerak dalam kegiatan pemasaran. Sehingga kelembagaan formal maupun nonformal belum sepenuhnya mendukung pengembangan kawasan minapolitan.

Saran

Adapun saran untuk pengembangan kawasan minapolitan adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh komponen Teknostruktur (masyarakat pesisir, pemerintah, dan pelaku usaha) secara aktif dalam pengelolaan, penataan ruang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kontrol proses budidaya rumput laut, pengolahan rumput laut, dan kegiatan pemasaran hasil rumput laut untuk pengembangan kawasan minapolitan serta Pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan aktifitas budidaya rumput laut sampai kegiatan pemasaran.
2. Kelembagaan formal maupun nonformal harus melembaga di masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan minapolitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Akzam. 2011. *Kearifan Lokal Nelayan Torani Dalam Dinamika Modernisasi Perikanan Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Pa'lalakang Kecamatan Galesong)*. Skripsi. Makassar.
- Dahuri dan Alimuddin. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradya Paramitha. Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Purwadaminta. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Putaka Jakarta.
- Sonny, Keraf 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunoto, 2010. *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan*. Staf Ahli kementerian kelautan dan perikanan.